

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 156/ PDT/ 2018/ PT.
MKS TENTANG AKTA DIBAWAH TANGAN TANPA TANGGAL**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin
Makassar**

Oleh :

**ARDI
NIM: 10400116033**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardi
Nim : 10400116033
Tempat/Tgl. Lahir : Bellalao, 22 Desember 1997
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Perum. Paccinnongan Harapan Pa 20/ No 18
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Tinggi No.156/Pdt/2018/PT.
Mks Tentang Akta Dibawah Tangan.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 20 Juli 2020

Penyusun,

ARDI

NIM : 10400116033

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 156/PDT/2018/PT. MKS TENTANG AKTA DIBAWAH TANGAN TANPA TANGGAL, yang disusun oleh Ardi, NIM: 10400116033, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 16 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariaah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 16 Juli 2020 M
25 Dzulqaidah 1441 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M. Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Muh Saleh Ridwan, M. Ag.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Marilang, M.Hum	(.....)
Munaqisy II	: St Nurjannah, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Erlina, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Istiqamah, S.H., M.H	(.....)

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M. Ag
NIP. 19731122 200012 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil Aalamiin Segala puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt. atas berkat dan rahmat-Nya skripsi yang merupakan tugas akhir dari perkuliahan ini dapat penyusun rampungkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum (IH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Dengan rampungnya skripsi ini, besar harapan penyusun agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Ucapan maaf dan terima kasih yang tidak terhingga atas partisipasi para pihak yang telah berjasa membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Teruntuk kepada kedua orang tua saya Ayahanda **Mardin** dan **Ernawati** sebagai motivator terbesar yang telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dan dukungan baik moral ataupun materil yang telah di berikan selama ini demi kelanjutan studi putrinya.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A.,P.hd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Rahman Syamsuddin,S.H.,M.H dan Abd. Rais Asmar . S.H ., M.H masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Ibu Erlina, S.H., M.H. dan Ibu Istiqamah, S.H., M.H masing-masing selaku Pembimbing I dan II yang senantiasa memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Marilang , S.H., M.Hum dan Ibu St. Nurjannah, S.H., M.H selaku penguji I dan II yang memberikan kritik, saran serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
7. Kepala Pengadilan Tinggi Makassar yang telah memberikan izin penelitian di Pengadilan Tinggi Makassar.
8. Bapak I Wayan Supartha, S.H., M.H yang telah membantu dengan memberikan informasi, data, arahan dan bimbingan selama proses penelitian
9. Seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Makassar yang telah membantu peneliti selama penelitian di Pengadilan Tinggi Makassar.
10. Seluruh Keluarga besar peneliti yang telah memberikan semangat dan motivasi yang tiada hentinya.
11. Teman – teman Karang taruna Maccolliloloe Desa Soga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng yang senantiasa memberikan dukungan serta doa yang tiada hentinya.
12. Teman – teman alumni SMPN 4 Marioriwawo ang.2013 dan alumni SMAN 1 Marioriwawo Ang. 2016 yang senangtiasa memberikan motivasi, semangat, serta doa tiada hentinya.

13. Teman-teman seperjuangan Diktum dan Ilmu Hukum terkhusus IH A 2016 yang memberikan banyak cerita dan pengalaman.
14. Teman – teman Organda Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng (IMPS) yang selalu menyemangati serta memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman – teman UKM Olahraga UINAM yang senantiasa memberikan semangat serta doa yang tiada henti
16. Teman-teman Fakultas Syari'ah dan Hukum Angkatan 2016, KKL Falak, PPL (Profesi Hukum) Komisi Persaingan Usaha Makassar, KKN Kecamatan Patampanua Pinrang Angkatan 62 terkhusus Desa Pincara yang senantiasa memberikan semangat tiada henti.
17. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mengambil bagian dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak sempat dituliskan namanya. Terima kasih sebesar-besarnya. Jerih payah kalian sangat berarti.

Demikian yang dapat penyusun sampaikan. Besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apa bila dalam penulisan ini terdapat banyak ketidak sempurnaan. Olehnya, penyusun menerima kritik dan saran pembaca sebagai acuan penulis agar lebih baik lagi di penulisan selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Gowa, 14 juli 2020

Penyusun,



Ardi

NIM : 10400116033

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
BAB 1 PENDAHULUAN..	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pembuktian	13
1. Pengertian Hukum Pembuktian	13
2. Prinsip Umum Hukum Pembuktian	16
B. Akta	25
1. Pengertian Akta	25
2. Fungsi Akta	26
3. Macam – Macam Akta	27
a. Akta Otentik	27
b. Akta Dibawah Tangan	29
C. Upaya Hukum	34
1. Upaya Hukum Biasa	34
a. Perlawanan (<i>Verzet</i>)	34
b. Banding	35
c. Kasasi	38
2. Upaya Hukum Luar Biasa	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran umum lokasi penelitian	44
1. Sejarah Pengadilan Tinggi Makassar	44
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Makassar	45
3. Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Makassar	46
B. Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal Dalam Perkara Perdata	48

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal Sebagai Alat Bukti di Persidangan Dalam Putusan No. 156/Pdt/2018/PT. Mks	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Implikasi Penelitian	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>ḍammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	A	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	I	i dan garis di atas
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Tā' marbū'ah

Transliterasi untuk tā' marbū'ah ada dua, yaitu: tā' marbū'ah yang hidup Ta'marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan dengan huruf "t". tā'marbutah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h".

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأُطْفَالِ : *raudal al-at fal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjainah*

6. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di

tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

أُمِرْتُ : *umirtu*

2. Hamzah tengah

تَأْمُرُونَ : *ta' muruna*

3. Hamzah akhir

سَيِّءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

Fil Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *Dinullah billah*

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

10. *Huruf Kapital*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang.

Contoh: *Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

Wa ma Muhammadun illa rasul

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
Saw.	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Ardi

NIM : 10400116033

Jurusan : Ilmu Hukum

**Judul : Analisis Putusan Pengadilan Tinggi No. 156/ pdt/ 2018/ Pt. Mks
Tentang Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal**

Pokok permbahasan dari penelitian ini adalah Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 156/ Pdt/ 2018/ PT. Mks Tentang Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal, Pokok permasalahan dibagi dua yaitu: 1.Bagaimana Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal Dalam Perkara Perdata. 2.Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal Sebagai Alat Bukti di Persidangan Dalam Putusan No.156/pdt/ 2018/ PT. Mks.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan pihak yang terkait, kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tanpa tanggal sempurna apabila isi dan tanda tangannya diakui oleh masing – masing pihak. Akan tetapi karena pembuatannya tidak melibatkan pihak ketiga dalam hal ini pejabat yang berwenang, bisa saja tanda tangan dan isi dalam akta dibawah tangan tersebut disangkal di kemudian hari oleh salah satu pihak yang berjanji. Pembuktian akta dibawah tangan dalam persidangan harus ditambah dengan alat bukti lain untuk menguatkan akta dibawah tangan tersebut. Akta dibawah tangan dalam Putusan No.156/Pdt/2018/PT.Mks dianggap oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak memiliki nilai pembuktian dan dianggap tidak sah serta tidak bisa dijadikan sebagai bukti permulaan karena dari penambahan alat bukti yang diajukan penggugat/ terbanding untuk menguatkan akta dibawah tangan, semua alat bukti tersebut menurut hakim tidak dapat mendukung akta dibawah tangan tersebut.

Implikasi dalam penelitian ini yaitu diperlukannya peraturan perundang – undangan yang jelas yang mengatur tentang pembuatan akta dibawah tangan agar kedepannya senantiasa tercapai kepastian hukum dan masyarakat kiranyaa teliti dalam melakukan sebuah perjanjian.

**Kata kunci :Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 156/Pdt/2018/PT. Mks
Tentang Akta Dibawah Tangan**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi penduduk kurang lebih sebanyak 265 juta jiwa, ini merupakan penduduk terbesar ke 4 menurut data The Spectator Index. Populasi penduduk yang banyak ini tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas hubungan sosial masyarakat dimana di lingkungan masyarakat muncul interaksi – interaksi sosial masyarakat yang satu dengan yang lainnya atau muncul suatu hubungan hukum antara masyarakat lainnya.

Hubungan hukum yang lahir di lingkungan masyarakat melahirkan suatu hubungan hukum yang bisa menimbulkan hubungan baik dan juga bisa melahirkan suatu permasalahan antara subjek hukum tersebut. Suatu permasalahan hukum bukan hanya marak terjadi pada kasus pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan tetapi juga biasa terjadi pada kasus mengenai harta benda, misalnya pemalsuan dokumen, penipuan dan penggelapan.

Penyelesaian dari pelanggaran – pelanggaran hukum tersebut tentu tidak semuanya bisa diselesaikan secara damai melainkan pelanggaran hukum tersebut diselesaikan di rana pengadilan. Berbagai permasalahan di lingkungan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diselesaikan di pengadilan, dimana pengadilan diberi hak oleh undang – undang untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Sistem hukum di Indonesia mempunyai dua tingkatan peradilan berdasarkan cara pengambilan keputusannya yaitu *judex facti* dan *judex juris*.

Pengambilan keputusan pada tingkatan *judex facti* yaitu tingkatan peradilan yang berwenang memeriksa perkara berdasarkan bukti dan menentukan fakta – fakta dari suatu perkara, sedangkan tingkatan peradilan *judex juris* yaitu tingkatan peradilan yang memeriksa penerapan hukum yang dijatuhkan pada suatu perkara. Tingkatan peradilan pada *judex facti* terdiri atas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sedangkan pada tingkatan *judex juris* terdiri dari Mahkamah Agung.

Dalam hukum acara perdata, hakim perdata selalu terikat pada kepentingan-kepentingan perorangan, karena hukum perdata melindungi kepentingan dan hukum perorangan, antara penggugat dan tergugat merupakan atau memiliki batas – batas sendiri, untuk diadili oleh hakim perdata. Sehingga hakim perdata dibolehkan mengabulkan apa yang digugat, dan tidak diperkenankan untuk memenuhi apa yang tidak digugat. Maka pembuktian dalam acara perdata, hanyalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil – dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹

Menurut Goodhart, setiap hakim akan mengulas fakta – fakta suatu perkara yang dapat dibuktikan. Berdasarkan fakta – fakta tersebut, hakim mengulas argumen hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan dalam rangka memutus suatu perkara. Fakta fakta yang terpenting dalam suatu perkara tersebut digabungkan dengan argumen – argumen hukum menjadi suatu pertimbangan sebagai prinsip hukum yang bersifat mengikat.²

¹ Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*. (Cet-I; Depok: PT. Rajagrafindo Persada. 2018), h.111.

² Helni Sapa, “Analisis Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Dibawah Tangan”, skripsi (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2013), h.2.

Hakim dalam peradilan perdata memutus perkara berdasarkan fakta – fakta di persidangan sehingga para pihak dalam persidangan baik penggugat ataupun tergugat harus membuktikan atau mengajukan alat bukti yang bisa meyakinkan hakim bahwa gugatannya adalah benar.

Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Perdata dan diakui oleh hukum salah satunya yaitu alat bukti tulisan atau surat. Bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang pertama disebutkan dalam undang – undang dan merupakan alat bukti paling utama dari yang lain.

Alat bukti tertulis sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, hal ini telah diutarakan sebelumnya bahwa alat bukti tertulis yaitu akta dan surat sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari apabila terjadi sengketa.³

Bukti secara tulisan atau surat dibagi menjadi dua yaitu akta dan bukan akta. Akta adalah alat bukti tertulis yang diberi tanda tangan serta memuat peristiwa – peristiwa yang menjadi dasar dari suatu perikatan, sehingga menjadi dasar bahwa akta sengaja dibuat untuk pembuktian sedangkan yang termasuk bukan akta adalah semua alat bukti tertulis namun tidak memenuhi unsur – unsur sebagai akta yaitu tidak adanya tanda tangan. Contoh surat bukan akta adalah karcis, tiket, surat pribadi, surat rumah tangga dan sebagainya.

³ H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Cet-I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004), h.70-71.

Akta sendiri terbagi atas dua macam yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik merupakan akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat surat tersebut sedangkan akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat tanpa perantara pejabat umum melainkan akta tersebut cuma dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang akan melakukan perjanjian.

Faktor penting dalam akta dibawah tangan adalah tanda tangan. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan melekat pada tanda tangan, benar tidaknya akta yang bersangkutan di lihat dari pengakuan tanda tangan para pihak, sehingga akta dibawah tangan memerlukan pengakuan dari para pihak yang bersangkutan, agar mempunyai kekuatan pembuktian.

Pasal 1876 KUHPerdara atau Pasal 189 RBg menegaskan, barang siapa yang terhadapnya diajukan akta dibawah tangan diwajibkan secara tegas mengakui atau mengingkari tanda tangannya. Berarti kalau diakui oleh pihak lawan, maka penandatanganan akta dibawah tangan dapat dikatakan untuk keuntungan pihak lain, akan tetapi apabila dipungkiri, yang terjadi bukan menguntungkan , bahkan dapat mendatangkan kerugian.

Apabila tanda tangan dalam akta dibawah tangan diingkari atau tidak mendapat pengakuan dari salah satu pihak maka pembuktian dibawah tangan runtuh dan anjlok menjadi bukti permulaan tulisan, sehingga untuk membenarkan akta di bawah tangan tersebut harus ditambah alat bukti lain seperti saksi.

Berbeda dengan akta otentik, pada akta dibawah tangan tidak ada aturan secara tegas mengenai syarat – syarat formil pembuatan akta dibawah tangan, misalnya tidak ada aturan yang tegas tentang pencantuman tanggal dan tempat pada akta dibawah tangan melainkan dalam aturan perundang – undangan dan KUHperdata cuma menitikberatkan pada penandatanganan oleh kedua belah pihak atau lebih.

Menurut Yahya Harahap pada bukunya Hukum Acara Perdata, kelalaian menyebut tempat dan tanggal dalam pembuatan akta dibawah tangan tidak mengurangi keabsahannya sebagai akta dibawah tangan karena undang – undang tidak menyebut tempat dan tanggal sebagai syarat akta dibawah tangan, berbeda dengan akta otentik, Pasal 25 huruf d PJN menentukan dengan tegas pencantuman tempat, hari, bulan, dan tahun pembuatan akta, merupakan syarat yang harus dipenuhi, sehingga apabila lalai mencantumkan tanggal dan tempat pembuatan mengakibatkan akta otentik tidak sah sebagai akta otentik, tetapi hanya berkekuatan sebagai ABT.⁴

Pembuktian dalam persidangan sangatlah penting sehingga menjadi bahan pertimbangan hakim, dan hakim menjatuhkan sebuah putusan dengan sebenar – benarnya sebagaimana diatur dalam QS. Al-Nisa(4):135 yaitu:

⁴ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Cet-II; Jakarta: Sinar Grafika. 2017), h.672.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
 لِأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ
 إِنْ تَلُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu dan bapak kersbstmu. Jika (dia yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya (kebaikannya) maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala yang kamu kerjakan.⁵

Salah satu contoh kasus pembuktian akta dibawah tangan tanpa tanggal dan materai terjadi di Pengadilan Negeri Bantaeng dan berlanjut di Pengadilan Tinggi Makassar dimana masing – masing mengeluarkan putusan yang berbeda.

Para pihak ahli waris almarhum H. MUH SAID BADDU yaitu Hj. NIRNA SAID sebagai “Penggugat I”, H. Nirwan Said, S.T sebagai “Penggugat II”, Firman Said sebagai “Penggugat III”, H. Adytiawan, S. E sebagai “Penggugat IV”, dan Siska Putri Utami Said, S.K.G sebagai “Penggugat V”, yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bantaeng terhadap Hj. Suwarni Binti H. Abd. Halim Qallabo sebagai “Tergugat I”, Nuraeny Kurnia Alias Mantang sebagai “Tergugat II”, Anwar Kurnia sebagai “Tergugat III”, Nurmala Kurnia, Amd. Keb. Sebagai “Tergugat IV”, dan Nursyam Kurnia sebagai “Tergugat V”.

⁵ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: AL-Qalam, 2014), h.100.

Kasus itu bermula ketika para pihak ahli waris almarhum H. MUH SAID BADDU mempunyai kwitansi transaksi jual beli tanah dengan nomor PBB-73.03.010.011.011-0143.0. dengan HJ. SUWARNI sebagai “Tergugat I” selaku pemilik tanah tersebut. Namun HJ. SUWARNI menyangkal atas tanda tangan di kwitansi tersebut, tetapi saksi yang dihadirkan oleh pihak tergugat tidak ada pernah menyangkal bahwa tanda tangan dari HJ. SUWARNI dalam akta itu bukanlah tandatangannya. Adapun saksi yang dihadirkan penggugat di persidangan mengatakan bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara almarhum H. MUH SAID BADDU dengan HJ. SUWARNI. Dari peristiwa – peristiwa yang terjadi di persidangan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Bantaeng memutus perkara itu dengan menerima gugatan dan menyatakan bahwa kwitansi yang berbentuk surat dibawah tangan tanpa tanggal dan materai dinyatakan sah dan mengikat.

Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng tidak diterima oleh HJ SUWARNI BINTI ABD HALIM QALLABU, dkk, sehingga melakukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 6/ Pdt. G/ 2017/ PN. Ban, tanggal 04 Januari 2018 untuk diperiksa dalam tingkat banding.

Adapun putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yaitu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 6/ Pdt. G/ 2017/ PN. Ban, tanggal 04 Januari 2018. Kedua lembaga peradilan tersebut masing – masing mengeluarkan putusan yang berbeda namun dengan proses pembuktian yang sama yaitu *judex facti*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik mengkaji atau meneliti mengenai putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Pengadilan Tinggi No. 156/ Pdt/ 2018/ PT. Mks Tentang Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal”**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.156/ Pdt/ 2018/PT. mks tentang surat dibawah tangan antara Hj. Suwarni binti Abd. Halim Qallabo (Pembanding I), Nuraeny Kurnia alias Mantang (Pembanding II), Anwar Kurnia (Pembanding III), Nurmala Kurnia, Amd., Keb. (Pembanding IV), Nursyam Kurnia (Pembanding V) melawan Hj. Nirna Said (Terbanding I), H. Nirwan Said (Terbanding II), Firman Said, S.Sos. (Terbanding III), H. Adytiawan Said, SE. (Terbanding IV), Siska Putri Utami (Terbanding V) yang berlangsung di Pengadilan Tinggi Makassar.

2. Deskripsi Fokus

Adapun yang menjadi deskripsi fokus dalam penelitian ini yaitu akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat tidak melalui perantara atau pejabat umum melainkan sebuah akta yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang ingin melakukan perjanjian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi pokok masalah adalah “Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Tinggi No. 156/Pdt/2018/PTMks Tentang Akta di Bawah Tangan Tanpa Tanggal ?”. supaya pembahasan tidak meluas maka penulis membatasi sub pokok masalah dalam studi penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal Dalam Perkara Perdata ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal Sebagai Alat Bukti di Persidangan Dalam Putusan No.156/pdt/ 2018/ PT. Mks ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian berisi teori – teori yang relevan dengan pokok permasalahan. Melakukan pengkajian dengan menggunakan literatur yang tersedia. Kajian pustaka ini berguna sebagai dasar studi dalam penelitian ini. Adapun beberapa referensi yang dijadikan sebagai rujukan dalam mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan oleh Helni Sapa (2013) Universitas UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Analisis Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian DiBawah Tangan”. Dengan fokus penelitiannya yaitu alasan/ faktor Bagaimana kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dikaitkan dengan kewenangan notaris dalam Legalisasi dan Waamerking dan Apakah akta dibawah tangan

yang telah memperoleh Legalisasi dan Waamerking dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim. Adapun perbedaan dengan penelitian saya yang berjudul Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No.6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 Januari 2018). Dengan fokus penelitian yaitu Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap akta di bawah tangan tanpa tanggal dan materai dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 Januari 2018 dan Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 Januari 2018

2. Penelitian ini dilakukan oleh Amir Syam Marsuki (2012) Universitas UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Penerapan Teori-Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama Watansoppeng. Dengan fokus penelitian yaitu Bagaimana teori pembuktian menurut hukum perdata dan Bagaimana hakim menerapkan teori pembuktian di Pengadilan Agama Watansoppeng. Adapun perbedaan dengan penelitian saya yang berjudul Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No.6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 Januari 2018). Dengan fokus penelitian yaitu Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap akta di bawah tangan tanpa tanggal dan materai dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 Januari 2018 dan Bagaimanakah pertimbangan

hakim terhadap kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 Januari 2018

3. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul tentang “Hukum Acara Perdata”. Dalam buku ini membahas secara keseluruhan tentang pembuktian dalam perkara perdata. Adapun hal yang menarik dari buku ini yang membedakan dengan buku sejenisnya yaitu dalam buku ini dijelaskan secara keseluruhan tentang pembuktian, mulai dari prinsip umum pembuktian, beban pembuktian, batas minimal pembuktian, jenis – jenis alat bukti sampai dengan kekuatan pembuktian tiap alat bukti.
4. R. Soeroso dalam bukunya yang berjudul tentang “Perjanjian Dibawah Tangan”. Dalam buku ini membahas secara keseluruhan tentang surat dibawah tangan. Adapun yang menarik dalam buku ini yaitu materi – materi dalam buku secara eksplisit membahas akta dibawah tangan mulai dari pengertian akta dibawah tangan, kekuatan pembuktian akta dibawah tangan sampai dengan cara penyusunan akta dibawah tangan.
5. M. Natsir Asnawi dalam bukunya yang berjudul tentang “Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia”. Dalam buku ini membahas tentang pembuktian alat bukti perdata dalam persidangan. Adapun yang menarik dalam buku ini yaitu buku ini menjelaskan secara eksplisit tentang kekuatan pembuktian alat bukti perdata.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tanpa tanggal dalam perkara perdata.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar terhadap kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tanpa tanggal sebagai alat bukti di persidangan dalam putusan No.156/pdt/ 2018/ PT. Mks.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian karya ilmiah ini untuk :

- a. Bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini.
- b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pembuktian dalam acara perdata pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Pembuktian*

1. Pengertian Hukum Pembuktian

Menurut Yahya Harahap, dalam buku M. Natsir Asnawi, mendefinisikan pembuktian dalam arti luas sebagai kemampuan penggugat dan/ atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa – peristiwa yang didalilkan (oleh penggugat) atau dibantu (oleh tergugat) dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal – hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara para pihak.¹

Dalam hukum Inggris, istilah membuktikan sering menggunakan dua perkataan, yaitu *Proof* dan *Evidence* sedangkan dalam hukum Belanda dikenal dengan istilah *bewijs*. Sekalipun telah dikenal istilah membuktikan, baik dalam hukum Inggris maupun dalam hukum Belanda, namun istilah – istilah tersebut belumlah cukup mewakili arti membuktikan disebabkan karena istilah membuktikan berkaitan dengan banyak hal seperti alat bukti, beban pembuktian, dan proses pembuktian dan sebagainya.²

¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, (Cet-1; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), h.2.

² Marilang. “Pembuktian Perjanjian dalam Praktek Monopoli”. *Jurisprudentie*. Vol 6, (2019). h.114.

Membuktikan adalah membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan, bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, adalah benar. Berhubung dengan itu, “membuktikan” dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.³

Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hakim.⁴

Banyak usaha yang dapat ditempuh untuk meyakinkan hakim itu tetapi belum tentu semuanya itu mampu meyakinkannya, disamping belum tentu semuanya itu diperkenankan oleh hukum acara. Karena itulah usaha tersebut perlu diatur supaya para pencari keadilan dapat mempergunakannya disamping agar hakim tidak sembarangan dalam cara menyusun keyakinannya. Karenanya dalam hukum acara perdata (termasuk juga pidana), alat – alat bukti itu ditentukan, diatur cara pihak mempergunakannya, diatur cara hakim menilainya dan baru dianggap terbukti kalau hakim yakin.⁵

Dalam suatu proses perkara perdata Hakim (Majelis) yang memeriksa perkara memerlukan bukti – bukti yang diajukan oleh pihak penggugat yang

³ R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Cet-IX; Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1985), h.62-63.

⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Asas – Asas Hukum Pembuktian Perdata*. (Cet-1; Jakarta: Penerbit Kencana, 2012), h.23.

⁵ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Cet-2; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h.144.

menuntut hak dan kepentingan hukumnya maupun dari pihak yang menyangkal/membantah dari tergugat yang juga berusaha mempertahankan dan membuktikan hak dan kepentingannya. Para pihak yang masing – masing ingin mengajukan bukti – bukti untuk dirinya itu hanya mungkin dilakukan dengan cara pembuktian. Sedangkan maksud dari “membuktikan” dari pihak penggugat maupun tergugat itu berarti, memberi fakta – fakta sebanyak – banyaknya dari para pihak tersebut guna keyakinan dan memberikan kesimpulan kepada Hakim atas kebenaran dalil – dalil tuntutan sebagai dalam gugatan penggugat dan sebaliknya kebenaran dari dalil sangkalan/bantahannya dari tergugat.⁶

Dalam suatu petitum gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada pihak tergugat, masing – masing harus menguatkan dalilnya baik pihak penggugat maupun tergugat. Kedua pihak tersebut bersaing untuk memenangkan suatu perkara dengan mengajukan alat bukti yang kuat sehingga alat bukti tersebut berpengaruh terhadap hasil akhir persidangan. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut dikabulkan.⁷

Setiap pihak berhak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalilnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg yang menyatakan bahwa “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu

⁶ R.Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. (Cet-II; Semarang: Mandar Maju, 2005), h.111.

⁷ Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia*. (Cet-1; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 300.

perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.⁸

Dalam proses perkara yang ditangani hakim, pembuktian memiliki peran penting terhadap keberhasilan suatu persidangan perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana. Hakim dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, berbeda dengan perkara pidana, dimana yang dicari kebenaran materil.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting karena dalam tahap pembuktian inilah para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk mengemukakan kebenaran dari dalil – dalil yang dikemukakannya. Sehingga berdasarkan pembuktian inilah hakim atau majelis hakim akan dapat menentukan mengenai ada atau tidaknya suatu peristiwa atau hak, yang kemudian pada akhirnya hakim dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, adil, atau dengan kata lain putusan hakim yang tepat dan adil baru dapat ditentukan setelah melalui tahap pembuktian dalam persidangan penyelesaian perkara perdata di pengadilan.⁹

2. Prinsip Umum Hukum Pembuktian

Prinsip umum pembuktian dalam perkara perdata merupakan landasan diterapkannya suatu pembuktian. Semua subjek yang terlibat dalam persidangan, termasuk hakim harus berpatokan yang digariskan prinsip yang dimaksud.

⁸ M. Fauzan. *Pokok – pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. (Cet-II; Jakarta: Kencana, 2005), h. 35.

⁹ Ayu Riskiana Dinaryanti. "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris." *Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum* 1.3 (2013), h.4.

a. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil

Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang – undang (negatif wettelijk stelsel) seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran, namun dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (formeel waarheid). Namun hakim tidak dilarang mencari kebenaran materiil asal kebenaran itu ditegakkan diatas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat.¹⁰

Dalam mencari suatu kebenaran formil, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan hakim dan pihak yang berperkara.

1) Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif

Hakim hanya sebatas menerima dan memeriksa suatu perkara mengenai hal – hal yang yang diajukan pihak penggugat ataupun tergugat. Sehingga peran Hakim dalam perkara perdata terbatas karena Cuma mencari dan menemukan suatu kebenaran formil dimana kebenaran tersebut diperoleh berdasarkan alasan dan fakta yang diajukan oleh pihak yang berperkara selama berlangsungnya proses persidangan.

¹⁰ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Cet-II; Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.568-569.

Makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa apa – apa yang diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan, dengan ketentuan sebagai berikut:¹¹

- a) Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Semuanya itu menjadi hak dan kewajiban para pihak. Cukup atau tidak alat bukti yang diajukan, terserah sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Hakim tidak dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan undang – undang. Misalnya berdasarkan Pasal 139 HIR, salah satu pihak dapat meminta bantuan kepada hakim untuk memanggil dan menghadirkan seorang saksi melalui juru sita, apabila saksi yang bersangkutan relevan sedangkan dia tidak dapat menghadirkan sendiri saksi tersebut secara sukarela.
- b) Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim.
- c) Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan.

Sehubungan dengan itu, hakim tidak boleh melanggar asas ultra vires atau ultra petitum partium yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR. Hakim dilarang memberi lebih banyak dari yang diminta. Sekiranya yang dituntut penggugat Rp 100 jut, tetapi di persidangan terbukti kerugian yang dialami Rp 200 juta, maka

¹¹ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h.570.

yang boleh dikabulkan hanya terbatas Rp 100 juta sesuai dengan tuntutan yang disebut dalam petitum gugatan.¹²

2) Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta

Hakim dalam perkara perdata diharuskan mengambil putusan sesuai dengan pembuktian fakta yang ada di persidangan. Dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan harus bersumber fakta yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Pembuktian diterapkan berdasarkan dukungan fakta di persidangan.

Selama proses persidangan berlangsung dan memasuki tahapan pembuktian maka pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan mengajukan dan menyerahkan bahan atau alat bukti kepada hakim yang menangani perkara tersebut. Tujuan mengajukan alat bukti tersebut yaitu untuk meyakinkan hakim agar gugatan para pihak dapat diterima. Karena untuk meyakinkan hakim maka alat bukti yang diajukan di persidangan harus relevan terhadap pokok permasalahan yang dihadapi.

Kemudian bahan atau alat bukti tersebut dinilai oleh hakim sesuai dengan kebenaran yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya apabila bahan atau alat bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan dianggap tidak mampu membenarkan fakta yang didalilkan oleh pihak yang berperkara maka bahan atau alat bukti tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti.

¹² Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h. 570.

Fakta yang dinilai dan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan kebenaran terhadap putusannya, hanya fakta yang disampaikan didalam persidangan. Hakim tidak boleh menilai dan mempertimbangkan fakta yang ada di luar persidangan misalnya hakim menemukan fakta dengan mendengar cerita dari orang lain di luar persidangan, mendapatkan fakta dari sumber surat kabar atau majalah.

Fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, selama hal itu bukan fakta yang diajukan dan diperoleh dalam persidangan, tidak boleh dinilai dalam mengambil putusan. Demikian penegasan Putusan MA No. 2775 K/Pdt/1983 (tanggal 9-2-1985) yang menyatakan *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena memberi putusan berdasarkan alat bukti yang tidak diajukan dalam berkas perkara. Malahan seandainya benar surat bukti yang disebut PT dalam tingkat banding itu ada, surat bukti itu tetap diragukan kebenarannya. Penerapan ini meliputi fakta yang didengar hakim dari sumber lain di luar proses pemeriksaan. Meskipun banyak orang yang memberitahukan dan menunjukkan fakta kepada hakim tentang kebenaran perkara yang disengketakan, fakta itu harus ditolak dan disingkirkan dalam mencari kebenaran atas perkara dimaksud. Fakta yang demikian disebut *out of court*, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar mencari dan menemukan kebenarannya.¹³

¹³ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h.571.

Selain fakta harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, fakta yang bernilai sebagai pembuktian, hanya: ¹⁴

- a) Terbatas pada fakta yang konkret dan relevan, yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang disengketakan. Artinya alat bukti yang diajukan mengandung fakta konkret dan relevan atau bersifat prima facie, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa.
- b) Fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikan sebagai hal yang khayali atau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan sesuatu kebenaran. Artinya tidak semua fakta atau bukti yang diajukan bernilai sebagai alat bukti yang sah. Syarat utamanya, harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, sedang yang ditemukan di luar persidangan atau *out of court*, tidak dapat diadukan hakim sebagai dasar penilaian. Selain itu, bukti yang diajukan di persidangan harus mampu membuktikan fakta konkret yang langsung berkaitan dengan materi pokok perkara yang disengketakan. Sedangkan bukti yang hanya mengandung fakta abstrak, tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran suatu keadaan atau peristiwa hukum.

¹⁴ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h.572.

b. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Suatu perkara dikatakan berakhir apabila ada pengakuan dari salah satu pihak yang bersifat menyeluruh. Hubungan hukum antara pihak yang bersengketa dianggap selesai ketika dalil pokok penggugat diakui secara murni oleh tergugat. Begitupun sebaliknya apabila penggugat mengakui bantahan yang diajukan tergugat benar, maka gugatan penggugat di persidangan dianggap tidak benar.

Walaupun hakim berkeyakinan bahwa pengakuan dari salah satu pihak baik penggugat maupun tergugat tidak benar atau bohong, hakim haruslah menerima pengakuan tersebut sebagai fakta dan mengakhiri pemeriksaan karena permasalahan tersebut dianggap telah selesai.

Dalam penerapan prinsip pengakuan yang mengakhiri pemeriksaan perkara hakim harus memerhatikan dan mencermati pengakuan tersebut agar tidak keliru dalam mengeluarkan putusan. Pengakuan tersebut haruslah tegas baik dengan lisan maupun tulisan dan murni tanpa syarat dan langsung mengenai isi pokok perkara

c. Fakta – fakta yang tidak harus dibuktikan

Dalam persidangan ada beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan yaitu:

1) Hukum positif tidak harus dibuktikan.

Karena hakim dianggap sudah mengetahui hukum positif sehingga pihak yang bersengketa tidak perlu menyebut hukum mana yang dilanggar atau diterapkan terhadap masalah tersebut. Namun dalam penjatuhan putusan hakim,

hakim tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang berlaku sehingga hukum yang diterapkan sesuai dengan kasus yang disengketakan.

2) Fakta tidak dibuktikan apabila sudah diketahui secara umum.

Dalam hukum acara perdata dikenal suatu doktrin hukum pembuktian dengan nama *notoir feiten* atau fakta *notoir* doktrin ini mengajarkan bahwa fakta yang diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Fakta yang diketahui umum yaitu setiap peristiwa, kejadian atau keadaan dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan atau masyarakat yang terdidik, tanpa harus melakukan penelitian atau diskusi ilmiah. Kejadian atau keadaan itu memang demikian adanya sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum membenarkan sesuatu tindakan kemasyarakatan yang serius dalam bentuk putusan hakim.¹⁵

3) Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan.

Maksud dari fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan yaitu bahwa apabila fakta yang tidak disangkal oleh pihak lawan maka fakta tersebut tidak perlu dibuktikan, karena fakta yang tidak dibantah dalam persidangan dianggap telah terbukti kebenarannya.

4) Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak harus dibuktikan.

Dalam sebuah persidangan hakim yang menangani perkara tidak perlu lagi membuktikan sebuah fakta atau peristiwa yang diketahui, didengar, dan dilihat langsung oleh hakim. Karena dalam sebuah persidangan peristiwa dan fakta itu

¹⁵ H. Zainal Asikin. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. (Cet-1; Jakarta Prenadamedia Group, 2015), h.110.

didengar langsung oleh hakim sehingga fakta atau peristiwa tersebut tidak harus dibuktikan.

d. Bukti lawan (*tegenbewijs*)

Sistem peradilan perdata memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengajukan alat – alat bukti. Bukti lawan (*tegenbewijs*) hanya dimungkinkan dalam pemeriksaan suatu perkara secara *op tegenspraak*, yaitu pemeriksaan perkara yang di dalamnya terdapat minimal dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat, dimana tergugat menyangkal dalil – dalil gugatan penggugat. Pemeriksaan demikian menghadirkan lawan (tegen) dan karenanya diberi hak yang sama untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*).¹⁶

Pasal 1918 KUH-Perdata menyatakan: “ suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena sesuatu kejahatan maupun pelanggaran didalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. “

Pasal 1918 KUH Perdata tersebut memberikan hak kepada pihak lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembuktian sebaliknya itulah yang dimaksud dengan bukti lawan atau *tegenbewijs*.¹⁷

¹⁶ M.Natsir Asnawi. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. (Cet-1; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), h.27.

¹⁷ H. Zainal Asikin. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Cet-1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.111.

Eksistensi bukti lawan pada dasarnya merupakan perwujudan dari asas *audi et alteram partem*, yaitu mendengarkan kedua belah pihak berperkara. Dengan dibolehkannya bukti lawan, maka kesempatan kedua pihak untuk menang menjadi sama. Selain itu, adanya bukti lawan menyebabkan hakim dapat mengkonstatir peristiwa – peristiwa yang menjadi pokok sengketa untuk kemudian menetapkan hukumnya.¹⁸

B. Akta

1. Pengertian Akta

Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seorang atau lebih pihak – pihak yang dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Ini berarti bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa – peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta diatur dalam Pasal 1869 BW.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa – peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²⁰

¹⁸ M.Natsir Asnawi. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. (Cet-1; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), h.28.

¹⁹ R. Soeroso. *Perjanjian Di Bawah Tangan*. (Cet-1; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 6.

²⁰ Urip Santoso. *Pejabat Pembuat Akta Tanah*. (Cet-1; Jakarta: Kencana, 2016), h.126.

Akta merupakan sebuah tulisan yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pembuatnya sebagai bukti tentang suatu peristiwa hukum. Unsur penting dalam sebuah akta adalah tanda tangan. Sebuah akta memerlukan tanda tangan untuk menjamin tentang kebenaran terhadap tulisan akta tersebut.

2. Fungsi Akta

Dari segi hukum pembuktian akta mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Akta berfungsi sebagai formalitas kausa

Perbuatan hukum dianggap sah apabila ada akta, apabila tidak ada akta maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Akta digunakan untuk lengkapnya sebuah perbuatan hukum.

b. Akta berfungsi sebagai alat bukti

Fungsi utama akta ialah sebagai alat bukti. Artinya tujuan utama membuat akta memang diperuntukkan dan digunakan sebagai alat bukti. Dalam masyarakat sekarang, segala aspek kehidupan dituangkan dalam bentuk akta. Misalnya, dalam perjanjian jual beli para pihak menuangkannya dalam bentuk akta dengan maksud sebagai alat bukti tertulis tentang perjanjian tersebut. Bila timbul sengketa, sejak semula telah tersedia akta untuk membuktikan kebenaran transaksi.²¹

²¹ H. Zainal Asikin. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. (Cet-1; Jakarta: Prenadamedia Group., 2015), h.123.

c. Akta berfungsi sebagai probationis kausa

Akta berfungsi sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa sehingga peristiwa tersebut dikatakan benar – benar terjadi. Sehingga peristiwa atau hubungan hukum tersebut dibuktikan dengan adanya akta.

3. Macam – Macam Akta

Akta dibedakan menjadi dua macam yaitu :

a. Akta Otentik

1) Pengertian Akta Otentik

Akta otentik, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *authentic deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut *authentieke akte van*.²² Definisi akta otentik dapat ditemukan dalam Pasal 165 HIR / 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPerdara. Dalam ketentuan pasal – pasal tersebut, yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta semua orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hak yang tersebut dalam akta itu, dan juga tentang yang tercantum dalam akta itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut terakhir ini hanya sekadar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.²³

²² H. Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. (Cet-II; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 17.

²³ M.Natsir Asnawi. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Cet-1; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), h.48.

Akta otentik dibuat oleh dan ada yang dibuat dihadapan pegawai umum atau pejabat umum yang berkuasa membuatnya. Akta otentik yang dibuat oleh pegawai / pejabat umum sering disebut dengan akta pejabat (*acte ambtelijk*), sedangkan akta otentik yang dibuat dihadapan pegawai / pejabat umum sering disebut dengan akta partai (*acte partij*).²⁴

2) Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara :

“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang – orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.

Berdasarkan undang – undang, suatu akta otentik atau akta resmi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*). Artinya, jika suatu pihak mengajukan satu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akta itu sungguh – sungguh telah terjadi sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.²⁵

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Akan tetapi, jika alat bukti otentik tersebut dibantah oleh pihak lawan, maka kekuatan pembuktiannya turun menjadi bukti permulaan (*begin bewijskracht*). Dalam

²⁴ H. Zainal Asikin. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. (Cet-1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.124.

²⁵ Eddy O.S. Hiarij. *Teori dan Hukum Pembuktian*. (Cet- 1; Yogyakarta: Erlangga, 2012), h. 82.

kondisi demikian, untuk mencapai batas minimal pembuktian, maka akta otentik tersebut harus didukung oleh minimal satu alat bukti lainnya, misalnya minimal dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil.²⁶

Akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu :²⁷

- a) Kekuatan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- b) Kekuatan pembuktian materil, yang berarti membuktikan antara para pihak, bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta telah terjadi
- c) Kekuatan pembuktian yang mengikat, yang berarti disamping sebagai pembuktian antara mereka juga terdapat pihak ketiga dimana pada tanggal, bulan, dan tahun yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

b. Akta di Bawah Tangan

1) Pengertian Akta di Bawah Tangan

Akta dibawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya.²⁸ Akta

²⁶ M.Natsir Asnawi. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Cet-1; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), h.52 – 53.

²⁷ Richard Cisanto Pailit. “Kekuatan Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan”. *Lex Privatum* 3.2 (2015), h. 140.

²⁸ Moh. Taufik Makarao. *Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata*. (Cet-II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h.101.

dibawah tangan dibuat tanpa perantara pejabat umum melainkan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

Akta dibawah tangan untuk Jawa dan Madura diatur dalam Stb. 1867 No. 29, tidak dalam HIR. Adapun untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 RBg.²⁹

Adapun dalam Pasal 286 ayat (1) RBg, dikatakan :

Dipandang sebagai akta dibawah tangan yaitu surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat umum.

Dalam Pasal 1874 KUHPerdara, disebutkan :

Sebagai tulisan – tulisan dibawah tangan dianggap akta – akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat – surat, register – register, surat – surat urusan rumah tangga, dan lain – lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.

Demikian pula halnya Pasal 1 Stb. 1867 No. 29 menyatakan bahwa surat-surat, daftar (register), catatan mengenai rumah tangga, dan surat – surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat, termasuk dalam pengertian akta dibawah tangan.³⁰

Akta di bawah tangan atau *onderhands acte* merupakan akta yang dibuat tidak melalui perantara atau pejabat umum melainkan sebuah akta yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang ingin melakukan perjanjian, seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa.

²⁹ H. Zainal Asikin. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. (Cet-1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.125.

³⁰ H. Zainal Asikin. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, h.125.

Pembuatan akta dibawah tangan biasanya diikuti setelah terpenuhinya syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1320 yaitu untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni:³¹

- a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c) Suatu hal tertentu.
- d) Suatu sebab yang halal.

2) Kekuatan pembuktian Akta di Bawah Tangan

Adapun daya kekuatan pembuktian yang melekat pada akta dibawah tangan yaitu :

a) Daya Kekuatan Pembuktian Formil

Berdasarkan kekuatan formil ini, hukum mengakui, siapa saja atau orang yang menanda tangani akta dibawah tangan :³²

- 1) Dianggap benar menerangkan seperti apa yang dijelaskan dalam akta
- 2) Berdasar kekuatan formil yang demikian, mesti dianggap terbukti tentang adanya pernyataan dari penanda tangan: surat keterangan yang saya tanda tangani benar berisi keterangan saya.

³¹ Bambang Eko Muljono. “Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan.” *Jurnal Independent*, 5.1 (2017), h. 4.

³² Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Cet-2; Jakarta: Sinar Grafika., 2017), h.667.

- 3) Dengan demikian daya kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yaitu kebenaran identitas penanda tangan dan menyangkut kebenaran identitas orang yang memberi keterangan.

Dari uraian diatas setiap orang yang membuat pernyataan dan menandatangani tulisan yang berisi perbuatan hukum tersebut secara formil orang yang bertanda tangan di dalamnya dan yang membuat keterangan identitasnya sama dengan penandatanganan tersebut.

b) Daya Pembuktian Materiil

Dalam pembuktian materiil terfokus permasalahannya tentang kebenaran isi yang tercantum pada akta dibawah tangan.

1) Isi keterangan yang tercantum harus benar

Prinsip yang harus ditegakkan menghadapi penerapan daya pembuktian materiil adalah:³³

- Secara materiil isi keterangan yang tercantum di dalam akta dibawah tangan, harus dianggap benar.
- Dalam arti, apa yang diterangkan dalm akta oleh penandatanganan, dianggap benar sebagai keterangan yang dikehendakinya
- Dengan demikian secara materiil, isi yang tercantum dalam akta dibawah tangan mengikat kepada diri penandatanganan.

³³Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h. 669.

Putusan MA No. 3394 K/Sip/1983, ditegaskan karena tergugat mengakui isi dan tanda tangan, telah terpenuhi keabsahan akta dibawah tangan, dan secara materiil semua isi yang tercantum didalamnya dianggap benar meskipun pembuatannya tanpa disaksikan Kepala Desa maupun saksi yang lain dan diperkuat juga dengan Putusan MA No. 4434 K/Pdt/1986 yang menerangkan bahwa isi akta dibawah tangan tidak dibantah dengan tegas sehingga surat pernyataan tergugat tentang besarnya utangnya itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna.

- 2) Memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang – orang yang mendapat hak dari padanya.

Hal ini diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata dan Pasal 288 RBG. Suatu akta dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan atau akta itu hendak dipakai, dianggap sebagai diakui sehingga akta dibawah tangan tersebut mempunyai daya kekuatan yang sempurna dan mengikat seperti akta otentik.³⁴

- Kepada orang – orang yang menandatangani.
- Serta kepada ahli waris orang – orang itu dan kepada orang yang mendapat hak dari mereka.

Pada akta dibawah tangan apabila salah satu pihak mengingkari tanda tangan atau isi dari perjanjian tersebut maka akta dibawah tangan tersebut turun sebagai bukti permulaan sehingga pihak yang mengajukan akta dibawah tangan

³⁴ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h. 670.

tersebut harus membuktikan kebenaran dari akta tersebut harus menambah alat bukti lain.

C. Upaya Hukum

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.³⁵

Upaya hukum untuk melawan suatu putusan merupakan “hak” bagi mereka yang menjadi pihak dalam perkara, setiap orang yang menjadi pihak dalam suatu perkara baik dalam perkara gugat permohonan (*volunter*) ataupun *contentiosa* (tuntutan) sama – sama berhak mengajukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.³⁶

1. Upaya Hukum Biasa

a. Perlawanan (*Verzet*)

Perlawanan adalah upaya terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada persidangan pertama (putusan *verstek*). Kepada pihak yang dikalahkan serta diterangkan kepadanya bahwa ia berhak mengajukan

³⁵Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Cet-VIII; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), h.234.

³⁶Aris Bintania. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al – Qadha*. (Cet-II; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 167.

perlawanan (*verzet*) terhadap putusan tak hadir itu kepada pengadilan itu. (Pasal 125(3) HIR/149(3) RBG dan Pasal 153 (1) HIR/129 (1) RBG).³⁷

b. Banding

Upaya hukum banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang kalah pada pengadilan tingkat pertama melakukan perlawanan ke pengadilan tinggi melalui pengadilan yang memutus perkara tersebut atau sebagai upaya hukum perlawanan terhadap putusan yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama.

Pemeriksaan perkara pada tingkat banding bersifat pemeriksaan berkas, tidak lagi pemeriksaan langsung yang melibatkan para pihak, kesaksian atau proses pembuktian. Akan tetapi apabila majelis hakim atau hakim yang menangani perkara tersebut menghendaki, pemeriksaan tambahan bisa dilakukan demi kelengkapan berkas perkara yang akan diputuskan.³⁸

Banding adalah upaya hukum biasa melawan putusan Pengadilan Negeri oleh pihak – pihak berperkara perdata yang merasa tidak puas dan tidak dapat menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri. Upaya hukum itu diatur dalam Pasal 188 s/d 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura), dan dalam Pasal 199 s/ d 205 RBg (untuk daerah luar Jawa dan Madura). Tetapi dengan berlakunya Undang – Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka

³⁷Moh. Taufik Makarao. *Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata*. (Cet-II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h.161.

³⁸Ilham Bisri. *Sistem Hukum Indonesia*. (Cet-X; Depok PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 69.

Pasal 188 s/ d 194 HIR yang mengatur acara pemeriksaan banding untuk daerah Jawa dan Madura tidak berlaku lagi.³⁹

Permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan (Pasal 7 UU No. 20/ 1947). Urutan banding menurut Pasal 21 UU No. 4/ 2004 jo. Pasal 9 UU No. 20/ 1947 mencabut ketentuan Pasal 188 – 194 HIR, yaitu:⁴⁰

- 1) Ada pernyataan ingin banding.
- 2) Panitera membuat akta banding.
- 3) Dicatat dalam register induk perkara
- 4) Pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat.
- 4) Pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.

Pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan terhadap surat – surat yang ada hubungannya dengan berkas perkara tersebut dan jarang sekali terjadi, bahwa orang yang bersangkutan diperiksa, yaitu yang dinamakan penggugat dan tergugat selanjutnya diperiksa lagi oleh Pengadilan Tinggi. Hal tersebut hanya dilakukan jika Pengadilan Tinggi menganggap, bahwa pemeriksaan belum sempurna

³⁹ H. Zainal Asikin. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. (Cet-1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.137.

⁴⁰ H. Zainal Asikin. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, h.137.

dilakukan dengan menjatuhkan putusan sela dengan tujuan untuk menyempurnakan pemeriksaan perkara tersebut.⁴¹

Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, 199 Rbg), atau diberitahukannya putusan kepada pihak yang bersangkutan. Setelah satu pihak menyatakan naik banding dan dicatat oleh panitera, maka pihak lawan diberitahu panitera tentang permintaan banding itu selambat – lambatnyal4 hari setelah permintaan banding diterima dan kedua belah pihak diberi kesempatan untuk melihat surat – surat serta berkasnya di Pengadilan Negeri selama 14 hari (Pasal 11 ayat 1 UU No. 20 Tahun 1947, 202 Rbg). Kedua belah pihak boleh memasukkan surat keterangan dan bukti – bukti baru, sebagai uraian daripada alasan permohonan banding (memori banding) kepada panitera Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, sedang terbanding dapat menjawab memori itu dengan kontra memori banding. Kemudian salinan putusan serta surat-surat pemeriksaan harus dikirim kepada panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, selambat – lambatnyasatu bulan setelah menerima permohonan banding.⁴²

⁴¹ M. Nur Rasaid. *Hukum Acara Perdata*. (Cet-IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.66.

⁴² Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Cet-VIII; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), h.237.

Pengadilan Tinggi memeriksa perkara banding dengan majelis yang terdiri dari 3 orang hakim, dan kalau perlu dengan mendengar sendiri para pihak (Pasal 15 UU No. 20/1947).

Secara garis besar isi putusan banding yaitu :⁴³

- 1) Memperkuat putusan Pengadilan Negeri.
- 2) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri
- 3) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri, termasuk pula putusan yang didalamnya mengatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili dan didalam putusannya memerintahkan agar Pengadilan Negeri yang berwenang itu untuk memeriksa dan memutus (mengadili) perkara yang bersangkutan.

c. Kasasi

Menurut R. Wirjono Projodikoro, kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan – putusan Pengadilan lain dibawah Mahkamah Agung.

Putusan atau penetapan yang “bertentangan dengan hukum” disebutkan dalam Pasal 30 (1) UU Nomor 14 tahun 1985 disebutkan, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan dari semua lingkungan Pengadilan karena tidak berwenang atau melampaui batas

⁴³ R.Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. (Cet-II; Semarang: Mandar Maju, 2005), h.210.

wewenangannya, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.⁴⁴

Pemeriksaan pada tingkat kasasi yaitu pemeriksaan terhadap penerapan hukum oleh hakim di tingkatan *judex facti*. Jadi, tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980, istilah yang digunakan adalah *Request Civiel*. Dengan berlakunya Undang – Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, istilah *Request Civiel* diganti dengan istilah bahasa Indonesia yaitu peninjauan kembali. Walaupun putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahkan telah selesai dilaksanakan, masih ada kemungkinan untuk melakukan peninjauan kembali apabila ternyata ada alasan untuk itu dan dirasakan tidak adil jika terus berpegang pada putusan semacam itu.⁴⁵

⁴⁴Neng Yani Nurhayani. *Hukum Acara Perdata*. (Cet-1; Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.175.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Cet-X; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), h. 219.

Alasan untuk bisa dilakukan peninjauan kembali yaitu:⁴⁶

- a. Alasan putusan yang dimintakan peninjauan kembali didasarkan atas kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah putusan dikeluarkan, atau didasari oleh bukti – bukti yang oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat – surat bukti yang pada waktu perkara diperiksa alat bukti tersebut tidak ditemukan.
- c. Apabila dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut.
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari gugatan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab – sebabnya.
- e. Apabila antara pihak – pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

⁴⁶ H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Mualifah. Pengantar Hukum Indonesia. (Cet-1; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 260 – 261.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan, dimana penelitian lapangan adalah salah satu metode penelitian yang memerlukan pengetahuan dalam berbagai macam literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti dikarenakan penelitian ini langsung terjun ke lapangan jika ingin meneliti dengan cara wawancara, dokumentasi.

2. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian yaitu di Kota Makassar, yakni pada Pengadilan Tinggi Makassar. Yang terletak di Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar Sulawesi Selatan – Indonesia. Alasan mengambil lokasi tersebut karena merupakan instansi penegak hukum yang menangani perkara pembuktian akta dibawah tangan No Perkara 156/Pdt/2018/PT.Mks.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis digunakan antara lain untuk menganalisis berbagai teori-teori dan peraturan perundang – undangan, terkait dengan analisis hukum kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tanpa tanggal dan materai.

Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dimana kajian

pokoknya adalah pertimbangan hakim di pengadilan sampai menjatuhkan suatu putusan tentang pembuktian akta dibawah tangan.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan, data tersebut diperoleh dengan cara wawancara secara mendalam dengan pihak yang terkait langsung dengan perkara perdata No.156/Pdt/2018/PT.Mks yaitu I Wayan Supartha sebagai Hakim Ketua dalam perkara tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, literature, hasil penelitian, jurnal dan sebagainya, yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah usaha untuk memperoleh atau megumpulkan bahan - bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya dapat dipercaya dan sesuai kenyataan yang ada, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*)

Suatu teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara berupa pertanyaan langsung kepada pihak – pihak yang terkait ataupun yang menangani perkara perdata ini, antara lain Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memutus perkara ini.

2. Kepustakaan

Peneliti memperoleh data dengan membaca literature, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang surat dibawah tangan.

3. Dokumentasi

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu dokumen jurisprudensi tentang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tanpa tanggal dan materai yang sudah memperoleh hukum tetap.

E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Pengelolaan data merupakan teknik yang dilakukan setelah data di lapangan atau setelah data primer dan sekunder terkumpul. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang – undangan, buku – buku, dokumen – dokumen dan literature lainnya yang berkaitan dengan masalah pembuktian akta dibawah tangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Tinggi Makassar

Hofd Van Justitie (Pengadilan Tinggi) Makassar terbentuk pada bulan Maret 1951. Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949 antara Indonesia dengan Belanda antara lain melahirkan :

- a. Perjanjian KMB tanggal 23 Agustus 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dengan bentuk Negara Serikat (RIS).
- b. Lahir negara – negara bagian (boneka) termasuk NIT (Negara Indonesia Timur yang berkedudukan di Makassar tahun 1949 dan terbentuk pula *Ministeri Van Justitie O.I* (Departemen Kehakiman Indonesia Timur) di Makassar dimana pada waktu itu menteri kehakiman NIT yang pertama dijabat oleh Bapak Mr. Dr. Samokil.
- c. RIS (Republik Indonesia Serikat) dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950, negara – negara bagian RIS menyatakan: kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesiayang di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pasca pembubaran RIS, Negara Indonesia Timur (NIT) juga menyatakan bubar, dan pada saat itu terbentuklah *Hofd Van Justitie* (Pengadilan Tinggi) Makassar”, yang wilayah hukumnya meliputi Indonesia Bagian Timur (Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku) pada bulan Maret 1951 dengan nama ketua pengadilan pertama yaitu MR. R. Soerijacokro.

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Makassar

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Makassar meliputi provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.

a. Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak dibagian selatan Sulawesi, ibukotanya adalah Makassar, dahulu disebut Ujung Pandang. Provinsi Sulawesi – Selatan terletak di $0^{\circ}12' - 8^{\circ}$ Lintang Selatan dan $116^{\circ}48' - 122^{\circ}36'$ Bujur Timur. Luas wilayahnya 45.764,53 km². Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan, adapun kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare.

b. Sulawesi Barat

Sulawesi Barat adalah provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi yang dibentuk pada 5 Oktober 2004 ini berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004, ibukotanya adalah Mamuju. Luas wilayahnya sekitar 16,796.19 km².

Adapun kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Makassar

Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat merupakan lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Tinggi Makassar sebagai kawal depan (*Vorj Post*) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasal 51 menyatakan :

Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi mengadili (*judicialpower*), yakni memeriksa dan mengadili perkara – perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya”.

- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut Teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita /Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan di tingkat Pengadilan Negeri agar system peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- d. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- e. Fungsi lainnya :
 - 1) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.
 - 2) Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentil yang akan beracara di Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Makassar.

B. Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal Dalam Perkara Perdata

Akta dibawah tangan yaitu akta yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak tanpa melalui perantara pejabat umum. Akta dibawah tangan mengikat para pihak yang bertanda tangan di dalam akta tersebut.

Kekuatan akta dibawah tangan sempurna dan mengikat apabila tanda tangan dan isi dalam akta tersebut tidak dipungkiri oleh salah satu pihak dalam akta dibawah tangan tersebut. Pemungkiran tanda tangan dalam akta dibawah tangan diatur dalam Pasal 1876 KUHPerdata atau Pasal 189 RBg menegaskan, barang siapa yang terhadapnya diajukan akta dibawah tangan diwajibkan secara tegas mengakui atau mengingkari tanda tangannya. Berarti kalau diakui oleh pihak lawan, maka penandatanganan akta dibawah tangan dapat dikatakan untuk keuntungan pihak lain, akan tetapi apabila dipungkiri, yang terjadi bukan menguntungkan , bahkan dapat mendatangkan kerugian.

Apabila isi atau tanda tangan dalam akta dibawah tangan dipungkiri atau tidak diakui oleh salah satu pihak maka hakim memerintahkan pihak yang memiliki alat bukti akta dibawah tangan untuk menambah alat bukti lain seperti alat bukti saksi. Namun walaupun ada penambahan alat bukti saksi, hakim bisa saja tetap menganggap bahwa akta dibawah tangan tersebut tidak benar adanya atau tidak sah apabila kesaksian para saksi dianggap tidak benar atau fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan menganggap bahwa akta dibawah tangan tersebut tidak sah dan mengikat.

Salah satu Hakim Pengadilan Tinggi Makassar khususnya yang menangani perkara No.156/Pdt/2018/PT.Mks tentang akta dibawah tangan mengatakan bahwa kekuatan akta dibawah tangan tidak sesempurna akta otentik. Akta otentik apabila diajukan didalam persidangan dinyatakan sah dan mengikat tanpa penambahan alat bukti lain, berbeda dengan akta dibawah tangan biasa terjadi hal pemungkiran tanda tangan atau isi yang ada didalam akta dibawah tangan tersebut sehingga kekuatan pembuktiannya lemah dan harus ditambah alat bukti lain. Mengenai pencantuman tanggal dalam sebuah akta dibawah tangan tidak mengurangi keabsahan sebuah akta dibawah tangan, namun apabila dibantah oleh salah satu pihak maka pihak lain harus membuktikan bahwa memang telah terjadi perjanjian akta dibawah tangan.¹

Menurut analisis penulis syarat – syarat pembuatan akta dibawah tangan tidak diatur didalam undang – undang sehingga pembuatannya cuma menitikberatkan pada persoalan penandatanganan oleh masing – masing pihak, berbeda dengan akta otentik dimana diatur dalam Pasal 25 huruf d PJN menentukan dengan tegas pencantuman tempat, hari, bulan, dan tahun pembuatan akta, merupakan syarat yang harus dipenuhi, sehingga apabila lalai mencantumkan tanggal dan tempat pembuatan mengakibatkan akta otentik tidak sah sebagai akta otentik, tetapi hanya berkekuatan sebagai akta dibawah tangan. Namun pencantuman tanggal dalam sebuah kontrak/ perjanjian diharuskan agar terjadi sebuah kepastian hukum terhadap masing – masing pihak.

¹ I Wayan Supartha (64 Tahun), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar. Wawancara. Makassar 20 Januari 2020.

Pembuktian akta dibawah tangan tanpa tanggal dalam persidangan bisa saja dianggap kuat apabila isi dan tanda tangan dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang berjanji namun apabila isi atau tanda tangan dalam akta dibawah tangan tersebut dipungkiri maka pihak yang mempunyai akta dibawah tangan harus menambah alat bukti lain yang bisa memperkuat akta dibawah tangan.

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal Sebagai Alat Bukti di Persidangan Dalam Putusan No.156/Pdt/ 2018/ PT. Mks.

Kronologi kasus perkara perdata tentang akta dibawah tangan tanpa tanggal ketika para pihak ahli waris almarhum H. MUH SAID BADDU mempunyai kwitansi transaksi jual beli tanah dengan nomor PBB-73.03.010.011.011-0143.0 dengan HJ. SUWARNI sebagai “Tergugat I” selaku pemilik tanah tersebut. Namun HJ. SUWARNI menyangkal atas tanda tangan di kwitansi tersebut. Dari peristiwa – peristiwa yang terjadi di persidangan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Bantaeng memutus perkara itu dengan menerima gugatan dan menyatakan bahwa kwitansi yang berbentuk surat dibawah tangan tanpa tanggal dan materai dinyatakan sah dan mengikat dengan pertimbangan bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan oleh penggugat dapat menguatkan akta dibawah tangan tersebut atau membuktikan bahwa jual beli tanah dengan bukti akta dibawah tangan tersebut benar – benar peristiwa itu terjadi.

Pemeriksaan perkara perdata ini berlanjut di Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan yang berbeda dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Negeri Bantaeng, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili dan memeriksa perkara perdata tentang akta dibawah tangan menganggap bahwa akta dibawah tangan tanpa tanggal tersebut tidak memiliki nilai pembuktian atau dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar terhadap kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tanpa tanggal dalam putusan No. 156/Pdt/2018/PT.Mks akta dibawah tangan tersebut tidaklah memiliki nilai pembuktian karena majelis hakim meneliti bukti bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat baik bukti suratnya maupun keterangan saksi-saksinya, ternyata hanya bukti surat dibawah tangan saja yang menerangkan kalau tanah yang terletak di Kampung Kaili, Kelurahan Bonto Lebang Bissappu sudah dibayar oleh H Muh. Said Baddu kepada HJ. Suwarni Binti H. Abd Halim Qallabo, sedangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para terbanding semula Para Penggugat/ Terbanding tidak satupun ada yang menerangkan yang terkait dengan proses jual beli tanah yang didalamnya termasuk tanah sengketa tersebut dapat mendukung bukti surat jual beli akta dibawah tangan tersebut. Sehingga hakim mengenyampingkan alat bukti surat lain yang diajukan penggugat/ terbanding sebagai penguat akta dibawah tangan tersebut.

Mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat menurut hakim juga tidak ada yang mengetahui secara jelas tentang jual beli tanah yang didalamnya termasuk tanah sengketa tersebut, sehingga hakim hakim menilai akta dibawah tangan tersebut tidak benar adanya.

Saksi Romlah Alias Mantang, saksi Muhammad Idrus, dan Saksi Endi Budi Utomo, SE yang merupakan saksi yang dipanggil oleh penggugat/ terbanding mengetahui kalau tanah yang seluas 15.572 m² (lima belas ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang didalamnya termasuk tanah sengketa tersebut, telah dibeli / dibayar oleh H Muh. Said Baddu, karena diberitahu oleh H Muh. Said Baddu sendiri, sedangkan saksi Syahrir mengetahui kalau tanah yang seluas 15.572 m² (lima belas ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang didalamnya termasuk tanah sengketa tersebut, sudah dibeli oleh, H Muh. Said Baddu karena diberitahu oleh warga yang berada ditanah tersebut.

Hakim yang menangani perkara perdata No. 156/Pdt/2018/PT. Mks tentang akta dibawah tangan menilai bahwa akta dibawah tangan yang diajukan penggugat/ terbanding tidaklah memiliki nilai pembuktian, karena akta dibawah tangan tersebut tidaklah didukung oleh bukti – bukti lain. Jadi hakim memutuskan bahwa akta dibawah tangan tersebut tidak sah dan tidak mengikat.

Duduk Perkara Putusan No.156/Pdt/2018/PT.Mks

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 6/ Pdt.G/ 2017/ PN. Ban, tanggal 04 Januari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- a) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian
- b) Menetapkan secara hukum bahwa Kwitansi pembayaran Harga Tanah dengan No. PBB-73.03.010.011.0110143.0. yang terletak di Kampung Kaili Kelurahan Bonto Lebang Bissappu adalah sah dan mengikat
- c) Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sengketa seluas kurang lebih (k.l.) 11.531 M2 (sebelas ribu lima ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Kampung Kaili, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah H. MUH. SAID BADDU
 - Timur : Jalanan (Jalan Lingkar Selatan)
 - Selatan : Jalanan/lorong, rumah dan kios/ tempat jualan perempuan RAMLAH DG. MANTANG
 - Barat : Sawah H. I TUNG dan sawah H. MUH. SAID BADDU

adalah merupakan milik/harta peninggalan almarhum H. MUH. SAID BADDU yang merupakan bagian atau satu kesatuan sebagaimana dimaksud dalam SPPT PBB No. 73.03.010.011.011-0143.0 dan Para Penggugat berhak untuk memiliki atau mewarisinya bersama-sama dengan ahli waris almarhum H. MUH. SAID BADDU lainnya.
- d) Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum H. MUH. SAID BADDU dan berhak untuk memiliki atau mewarisi Tanah Sengketa tersebut bersama-sama dengan ahli waris almarhum H. MUH. SAID BADDU lainnya.

- e) Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V didalam menghalang-halangi maksud Para Penggugat untuk mengalihkan atau menjual Tanah Sengketa termasuk balik nama wajib pajak ke atas nama almarhum H. MUH. SAID BADDU serta tindakan Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V didalam menguasai dan mempertahankan Tanah Sengketa adalah merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum.
- f) Menyatakan secara hukum bahwa segala surat-surat atau tanda bukti hak yang diterbitkan atas Tanah Sengketa atas nama Tergugat I dan atau atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- g) Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan untuk selanjutnya dibagi waris antara Para Penggugat dengan ahli waris almarhum H. MUH. SAID BADDU lainnya.
- h) Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya.

Amar Putusan No.156/Pdt/2018/PT.Mks :

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tersebut.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 6/ Pdt.G/ 2017/ PN.Ban, tanggal 04 Januari 2018, yang dimohonkan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM KOVENSI:

- DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya.

- DALAM POKOK PERKARA:

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk sebagian
2. Menyatakan perbuatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana dikemukakan dalam gugatan Rekonvensi diatas merupakan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan semua surat yang mendasari penerimaan ganti rugi tanah atas nama Hj. NIRNA SAID/ Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi atas tanah seluas + 2891 m2 yang terhisap dalam tanah warisan peninggalan AHMAD KURNIA Bin H. PATTOLA adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menghukum Hj. NIRNA SAID/ Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang ganti rugi tanah seluas 2891 m2 yang diterima Hj. NIRNA SAID/ Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat

Rekonvensi atas ganti rugi tanah yang terhisap dalam tanah warisan peninggalan AHMAD KURNIA Bin H. PATTOLA untuk diserahkan kepada ParaTergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi secara tunai kontan dan sekaligus.

5. Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi yang selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Analisis Peneliti

Pembuktian memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah persidangan agar hakim dapat memutus suatu perkara dengan sebenar - benarnya. Pembuktian memegang peranan yang sangat penting karena dalam tahap pembuktian inilah para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk mengemukakan kebenaran dari dalil – dalil yang dikemukakannya. Sehingga berdasarkan pembuktian inilah hakim atau majelis hakim akan dapat menentukan mengenai ada atau tidaknya suatu peristiwa atau hak, yang kemudian pada akhirnya hakim dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, adil, atau dengan kata lain putusan hakim yang tepat dan adil baru dapat ditentukan setelah melalui tahap pembuktian dalam persidangan penyelesaian perkara perdata di pengadilan.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar terhadap akta dibawah tangan dalam Putusan No. 156/Pdt/2018/PT.Mks menganggap bahwa akta dibawah tangan tanpa tanggal tidak memiliki nilai pembuktian karena semua alat bukti yang diajukan Penggugat/ Terbanding tidak dinilai kuat oleh hakim untuk menguatkan akta dibawah tangan tanpa tanggal tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan No.156/ Pdt/ 2018. PT.Mks terjadi perbedaan pendapat dalam menilai alat bukti surat dibawah tangan dengan Pengadilan Negeri Bantaeng, dimana Pengadilan Negeri Bantaeng menganggap bahwa akta dibawah tangan yang diajukan penggugat dianggap sah dan mengikat karena akta dibawah tangan tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dalam persidangan perkara perdata tersebut dan sebaliknya Pengadilan Tinggi Makassar menganggap bahwa akta dibawah tangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sehingga dianggap tidak sah dan tidak mengikat dengan pertimbangan bahwa semua alat bukti yang diajukan Penggugat/ Terbanding baik bukti surat ataupun alat bukti saksi kesemuanya tidak dapat mendukung maupun menguatkan akta dibawah tangan tersebut. Adapun alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding semuanya hanya mengetahui atau mendengar bahwa telah terjadi jual beli tanah dengan akta dibawah tangan dari H. Muh. Said Baddu. Semua saksi tersebut tidak melihat terjadinya perjanjian akta dibawah tangan. Jadi dengan persangkaan hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menganggap bahwa akta dibawah tangan tanpa tanggal tersebut tidak benar – benar terjadi.

Menurut analisis penulis terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar sudah tepat dengan membatalkan putusan Pengadilan

Negeri Bantaeng No. 6/ Pdt.G/ 2017/ PN. Ban yang menganggap bahwa akta dibawah tangan tanpa tanggal sah dan mengikat karena kesemua alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, hanya bukti surat dibawah tanganlah yang menerangkan bahwa telah terjadi jual beli tanah antara H. Muh Said Baddu dengan H. Suwarni.

Mengenai persangkaan hakim dalam putusan tersebut menurut penulis sudah tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 1922 KUHPerdara bahwa persangkaan hakim diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim. Menurut Pasal tersebut yang dapat dijadikan sumber atau landasan alat bukti persangkaan hakim ialah dari saksi, bantahan atau surat.

Saksi yang dihadirkan Penggugat/ Terbanding yaitu Romlah Alias Mantang, Muhammad Idrus, dan Saksi Endi Budi Utomo dalam kesaksiannya menyatakan bahwa mengetahui telah terjadi jual beli tanah dengan akta dibawah tangan karena diberitahu oleh H. Muh Said baddu sendiri dan tidak pernah melihat surat dibawah tangan tersebut, sedangkan saksi yang keempat mendengar telah terjadi jual beli tanah dengan akta dibawah tangan karena mendengar dari warga setempat. Dari keempat saksi tersebut cuma memperkirakan bahwa telah terjadi jual beli tanah dengan akta dibawah tangan karena diberitahu sendiri oleh H. Muh Said Baddu, sehingga tidak melihat langsung transaksi jual beli tanah dengan akta dibawah tangan oleh H. Muh Said Baddu dengan H. Suwarni.

Dari keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai kesaksian yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 KUH Perdata yang menyatakan

bahwa tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya, Pendapat maupun dugaan khusus yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.

Mengenai surat atau akta diatur di dalam Hukum Islam khususnya mengenai perjanjian jual beli diwajibkan untuk ditulis dan harus dihadiri oleh minimal dua orang saksi agar kedepannya tidak terjadi keraguan, sebagaimana dalam Q.S. Al – Baqarah/2: 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

Wahai orang – orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya

atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki – laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki – laki, maka (boleh) seorang laki – laki dan dua orang perempuan diantara orang – orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi – saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa perjanjian dalam perdata harus ditulis agar kedepannya tidak ada keraguan mengenai adanya suatu perjanjian . Dan diharuskan juga untuk mengambil saksi agar supaya dapat menguatkan bahwa memang telah dilakukan suatu perjanjian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian tentang analisis putusan Pengadilan Tinggi No 156/Pdt/2018/PT. Mks tentang akta dibawah tangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tanpa tanggal sempurna apabila isi dan tanda tangannya diakui oleh masing – masing pihak. Namun apabila dipungkiri tanda tangan dan isi dalam akta dibawah tangan maka dapat merugikan pihak dalam akta dibawah tangan tersebut, sehingga didalam persidangan pembuktian akta dibawah tangan harus ditambah dengan alat bukti lain untuk menguatkan akta dibawah tangan tersebut.
2. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan No.156/Pdt/2018/PT.Mks tentang akta dibawah tangan, dianggap tidak memiliki nilai pembuktian serta tidak bisa dijadikan sebagai bukti permulaan karena dari penambahan alat bukti yang diajukan penggugat/ terbanding untuk menguatkan akta dibawah tangan, semua alat bukti tersebut menurut hakim tidak dapat mendukung akta dibawah tangan tersebut sehingga dalam persangkaan hakim akta dibawah tangan tersebut dianggap tidak sah dan mengikat.

B. Implikasi Penelitian

Setelah melakukan penelitian, maka ada beberapa implikasi penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Maraknya penggunaan akta dibawah tangan dikalangan masyarakat khususnya di pelosok – pelosok daerah sehingga diperlukan aturan yang tegas untuk mengatur tentang pembuatan dan kedudukan pembuktian akta dibawah tangan agar kedepannya terjamin kepastian hukum.
2. Perlunya diadakan penyuluhan hukum di masyarakat oleh pemerintah (PPAT) atau kampus - kampus tentang penggunaan akta otentik, dimana pembuktiannya dikemudian hari jelas dan mengikat para pihak baik pihak dalam akta maupun mengikat para hakim.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Asas – Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Cet-1; Jakarta: Penerbit Kencana, 2012.
- Anshoruddin, H. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asnawi, M Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Cet-1; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013.
- Azikin, H. Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Cet-1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Bakhri, Syaiful. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*. Cet-1; Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al – Qadha*. Cet-2; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bisri, Ilham. *Sistem Hukum Indonesia*. Cet-X; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cet-II; Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Cet-1; Yogyakarta: Erlangga, 2012.
- Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: AL-Qalam, 2014).
- Makara, Moh. Taufik. *Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata*. Cet-II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet-VIII; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- M. Fauzan. *Pokok – pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Cet-II; Jakarta: Kencana, 2005.
- Mualifah, H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet-II; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet-X; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Acara Perdata*. Cet-1; Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Cet-IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rasyid, H. Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet-II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Salim, H. *Teknik Pembuatan Akta Satui*. Cet-II; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Santoso, Urip. *Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Cet-1; Jakarta: Kencana, 2016.
- Soeparmono, R. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Cet-II; Semarang: Mandar Maju, 2005.
- Soeroso, R. *Perjanjian Di Bawah Tangan*. Cet-1; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Supomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Cet-XI; Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1985.
- Syamsuddin, Rahman. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Cet-1; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

JURNAL :

- Marilang. "Pembuktian Perjanjian dalam Praktek Monopoli". *Jurisprudentie*. Vol 6, (2019).
- Muljono, Bambang Eko. "Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan." *Jurnal Independent*, 5.1 (2017).
- Palit, Richard Cisanto. "Kekuatan Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan". *Lex Privatum* 3.2 (2015).
- Dinaryanti, Ayu Riskiana. "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris." *Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum* 1.3 (2013).

SKRIPSI :

- Helni Sapa, "Analisis Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Dibawah Tangan", skripsi (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2013).

UNDANG – UNDANG :

- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B- *65* /SH.01/PP.00.9/01/2020
Sifat : Penting
Lamp : Proposal
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Romang Polong, Januari 2020

**Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
di
Makassar**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Ardi
Nim	: 10400116033
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum (IH)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: Komp. Paccinongang Harapan

Bermaksud melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dengan judul skripsi :

"Analisis Putusan Pengadilan Tinggi No.156/Pdt/2018/PT.Mks tentang Akta di Bawah Tangan Tanpa Tanggal."

Dosen Pembimbing :
1. Erlina, M.H.
2. Istiqamah, S.H., M.H.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan Penelitian di **Pengadilan Tinggi Makassar**, terhitung mulai tanggal 10 Januari 2020 s.d. 10 Februari 2020

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak diucapkan terima kasih.



Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.
Nip: 19731122 200012 1 002

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa
(Sebagai Laporan)



PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
 Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Km. 4
 Tlp. 0411- 448365/448366 Fax. 0411-448365
 Makassar 90232

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : W22.U / 280 / HK / I / 2020

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANY BUNGA, S.H., M.H.
 NIP : 19590614 198803 2 001
 Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Program Sarjana yang beridentitas :

Nama : ARDI
 No. Mahasiswa : 10400116033
 Program Studi : Sarjana (S1) Hukum
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Telah selesai melakukan penelitian di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 20 Januari 2020, dan telah melakukan wawancara kepada Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar yaitu Bapak I WAYAN SUPARTHA, S.H., M.H. dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 156/PDT/2018/PT.MKS TENTANG AKTA DI BAWAH TANGAN TANPA TANGGAL". Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Januari 2020

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,
 PANITERA MUDA HUKUM

ANY BUNGA, S.H., M.H.
 NIP. 19590614 198803 2 001

**Wawancara dengan Bapak I Wayan Supartha, S.H., M.H selaku Hakim
Ketua dalam perkara No.156/Pdt/2018/PT. Mks tentang akta dibawah
tangan tanpa tanggal.**





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ardi, lahir di Bellalalo, Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 22 Desember 1997. Penulis lahir dari pasangan Mardin dan Ernawati dan anak pertama dari dua bersaudara.

Pendidikan penulis dimulai pada tahun 2003 di Taman Kanak-Kanak (TK) Hati Mulia Soga Kab. Soppeng, kemudian melanjutkan di Pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri (SDN) 224 Pallawa pada tahun 2004-2010. Pada Tahun 2010-2013 penulis kemudian lanjut pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Marioriwawo. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Marioriwawo yang sekarang berubah nama menjadi SMAN 5 Soppeng, pada tahun 2013-2016.

Selanjutnya pada tahun 2016, penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum melalui Jalur SPAN-PTKIN dengan mengambil Konsentrasi Perdata. Penulis menyelesaikan Studi pada tanggal 16 Juli 2020 dengan lama studi 3 Tahun 11 Bulan 16 Hari dengan IPK 3.79 Predikat *Cum Laude*.

Adapun pengalaman organisasi yakni sebagai salah satu Anggota Bidang Kesekretariatan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum Periode 2019/2020, Anggota UKM Olahraga Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016-2018, anggota Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa bersyukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Pengadilan Tinggi No.156/Pdt/2018/PT.Mks Tentang Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal”**. Semoga dengan penulisan Skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.